

**KAJIAN YURIDIS KERJA SAMA BELT ROAD INITIATIVE  
TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KERETA API  
CEPAT JAKARTA-BANDUNG BERDASARKAN *TRADE RELATED  
INVESTMENT MEASURES (TRIMs)* DAN PELAKSANAANYA DI  
INDONESIA**

**Rezki Miliyanri Ramadhan Simangunsong<sup>1</sup>, Jean Elvardi<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [rezkimiliyanri@gmail.com](mailto:rezkimiliyanri@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penanaman modal asing atau investasi asing merupakan bentuk lain dari perdagangan Internasional. Penanaman modal asing dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara penanam modal (*investor*) dengan negara penerima modal (*host country*). Salah satu regulasi internasional yang mengatur penanaman modal asing adalah *Trade Related Investment Measures (TRIMs)*. TRIMs merupakan salah satu kesepakatan dalam konvensi Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*). Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Tiongkok melalui kerja sama proyek kereta api cepat Jakarta Bandung dalam kebijakan *Belt Road Initiative*. kebijakan ini diindikasikan melanggar prinsip-prinsip fundamental TRIMs. Oleh karena itu masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah ketentuan yang termuat dalam TRIMs terkait kerja sama *Belt Road Initiative* (BRI), (2) Bagaimana kajian yuridis pelaksanaan Belt Road Initiative terhadap pembangunan infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung menurut TRIMs. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan dapat menyimpulkan bahwa kebijakan *belt road initiative* dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak sesuai dengan TRIMs. Proyek kereta api cepat mengalami beberapa hambatan dikarenakan kurangnya transparansi kebijakan seperti pembengkakan biaya, lambatnya proses pembangunan, serta tidak konsisten pembiayaan pembangun proyek sesuai dengan perjanjian awal. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam kebijakan BRI yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam perdagangan bebas, memerlukan suatu landasan hukum tersendiri dalam mengatur kebijakan BRI sehingga jelas pelaksanaan dan tidak menimbulkan permasalahan lain.

**Kata Kunci : *TRIMs, Belt Road Initiative, Kereta Api Cepat, Kebijakan***